



SIARAN PERS

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018

Kendari, Mei 2019

Bertempat di Aula Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 Pukul 10:00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018. Pada kesempatan kali ini Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Kota Baubau

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 dilakukan oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Ir. Hermanto, M.Si. ditujukan kepada Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari delapan kabupaten dan dua kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dalam sambutannya menyatakan bahwa secara umum pada hampir seluruh pemerintah daerah masih menjumpai permasalahan (1) Pengelolaan aset tetap yang belum optimal (2) Kesalahan penganggaran belanja daerah (3) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan yang belum tertib (4) Pengelolaan pendapatan yang belum tertib (5) Pelaksanaan pertanggungjawaban keuangan yang belum tertib.

Dan atas seluruh pelaksanaan, capaian serta hal – hal yang menjadi kriteria penentuan opini atas laporan keuangan, kepada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kolaka, Pemerintah Kabupaten Buton, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Kabupaten Bombana, Pemerintah Kabupaten Wakatobi, Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara, Pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Pemerintah Kabupaten Buton Tengah, Pemerintah Kota Kendari dan Pemerintah Kota Baubau Tahun Anggaran 2018, BPK memberikan opini **“WAJAR TANPA PENGECUALIAN”**.

Lebih lanjut Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara mengingatkan baik kepada Kepala Daerah maupun Ketua DPRD untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 60 hari dari hari ini merupakan batas pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara

Keterangan lebih lanjut:

Nur Kurniawan, Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara
Email : stafhtukalansultra@gmail.com